

ABSTRACT

Tax is one of the largest sources of state revenue in Indonesia. tax serves to fund national development. But in fact the state income tax sector declining from year to year. This decline can be seen from the percentage budget and the realization of state revenues in 2011 to 2013 based on the data the ministry of finance year 2014. Directorate General of Taxation has triedt to improve tax revenues. One of which is to perform the act of billing tax by letter of reprimand and forced letter.

The purpose of this research was to determine the effectiveness of the billing with a letter of reprimand and forced letter in optimizing corporate income tax revenues and to know how much the contribution of the corporate income tax with a letter of reprimand and forced letter of the tax revenue in the Madya Bandung tax office. The method used is descriptive comparative method. This method aims to find the cause and effect of the effectiveness of the letter of reprimand and a forced letter. Data analysis tools used in this study is a comparative analysis of the effectiveness ratio is the ratio of the issuance of a letter of reprimand and forced letter, and the ratio of contributions disbursement of tax arrears and forced letter warning against income tax receipts in KPP Madya Bandung. The results showed that the warning letter and Billing forced letter ineffective and contribute much less to the tax revenue in the Madya Bandung tax office.

Keywords : *Billing taxes, letter of reprimand, forced letter.*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia. pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional. Tetapi pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak semakin menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat dilihat dari persentase Anggaran dan Realisasi penerimaan Negara pada tahun 2011 sampai 2013 berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2014. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan dengan surat teguran dan surat paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan badan serta mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penghasilan badan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. metode ini bertujuan untuk mencari sebab-akibat dari efektivitas surat teguran dan surat paksa. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif rasio yaitu rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa, dan rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dan teguran terhadap penerimaan Pajak penghasilan di KPP Madya Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Bandung.

Kata kunci : Penagihan pajak, surat teguran, surat paksa.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Jenis-jenis Pajak.....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.4 Tarif Pajak.....	11
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak	13
2.2 Pajak Penghasilan	14
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	14
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	14
2.3 Utang Pajak.....	15

2.3.1	Timbulnya Utang Pajak	15
2.3.2	Berakhirnya Utang Pajak	16
2.3.3	Efektivitas	17
2.3.4	Kontribusi	18
2.4	Penagihan Pajak.....	19
2.4.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	19
2.4.2	Pengertian Penanggung Pajak dan Biaya Penagihan Pajak	20
2.4.3	Pengertian Pejabat dan Jurusita Pajak	20
2.4.4	Dasar Hukum Penagihan Pajak.....	21
2.4.5	Proses Penagihan Pajak	21
2.5	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	22
2.5.1	Pelaksanaan Surat Teguran	22
2.5.2	Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Surat Teguran	23
2.5.3	Penerbitan Surat Teguran.....	24
2.6	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	26
2.6.1	UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	26
2.6.2	Penerbitan Surat Paksa.....	28
2.6.3	Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi	28
2.6.4	Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Badan	29
2.7	Daluwarsa Penagihan.....	29
2.8	Rerangka Pemikiran	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.2	Metode Pengumpulan Data	34
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1	Jenis Data.....	36
3.3.2	Sumber Data	37
3.4	Metode Analisis	37
3.5	Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	42
4.1.1	Sejarah KPP Madya Bandung.....	42
4.1.2	Visi dan Misi KPP Madya Bandung	43
4.1.3	Struktur Organisasi KPP Madya Bandung	44
4.1.4	Jumlah Wajib Pajak di KPP Madya Bandung	48
4.1.5	Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Madya Bandung	48
4.2	Pembahasan	49
4.2.1	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Madya Bandung.....	50
4.2.2	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Madya Bandung.....	51
4.2.3	Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran	53
4.2.4	Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	54
4.3	Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan	55
4.3.1	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	55
4.3.2	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	57
4.4	Kontribusi Penagihan Pajak.....	60
4.4.1	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Bandung.....	60
4.4.2	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Bandung	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68

LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (<i>CURRICULUM VITAE</i>).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Rerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Percentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2013.....	2
Tabel 4.1	Jumlah Wajib Pajak di KPP Madya Bandung.....	48
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Bandung	48
Tabel 4.3	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Madya Bandung Tahun 2012-2014.....	50
Tabel 4.4	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Madya Tahun 2012-2014	52
Tabel 4.5	Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Madya Bandung Tahun 2012-2014.....	53
Tabel 4.6	Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Madya Bandung Tahun 2012-2014.....	54
Tabel 4.7	Pembayaran Surat Teguran di KPP Madya Bandung Tahun 2012-2014.....	56
Tabel 4.8	Pembayaran Surat Paksa di KPP Madya Bandung Tahun 2012-2014.....	58
Tabel 4.9	Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Bandung Tahun 2012- 2014.....	61
Tabel 4.10	Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Bandung Tahun 2012- 2014.....	63